

## TENAGA KERJA

2023

PERDA PROV. JATENG NO. 13, LD 2023/NO. 13, TLD NO. 154

PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - dalam rangka menjamin hak bagi setiap tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi mewujudkan dan mempertahankan kelangsungan kehidupan yang sejahtera, perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja serta memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan kepada pekerja guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

- Dasar hukum Peraturan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 21 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022, UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 31 Tahun 2023, PP No. 15 Tahun 2007, PP No. 33 Tahun 2013, PP No. 34 Tahun 2021, PP No. 35 Tahun 2021, PP No. 36 Tahun 2021, PP No. 37 Tahun 2021, Perda Prov. Jateng No. 2 Tahun 2021, Perda Prov. Jateng No. 2 Tahun 2022, Perda Prov. Jateng No. 4 Tahun 2022, Perda Prov. Jateng No. 2 Tahun 2023.
- Peraturan Daerah ini mengatur Penyelenggaraan Ketenagakerjaan melingkupi kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan Tenaga Kerja, produktivitas, pelatihan dan pemagangan kerja, penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja, penggunaan TKA, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan dan jaminan social, hubungan industrial, Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah, peran serta Masyarakat, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, sanksi, penghargaan, pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023

- Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
- Penjelasan: 8 hlm.